

PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP DISTRIBUSI BBM DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

Penulis : ESTER FRONIARTA, Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau

esteraquarius28@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to know and to analysis implementation of controlling toward BBM'S distribution in Pekanbaru City at 2011. The problem in the research are related to the controlling which is not optimum that done by City's Government that is official of industry and commerce because of extention, space/evironment/scope. The process of implementation which was done by Government of City working good appropriate with time and schedule to SPBU of Pekanbaru. Implementation of controlling consist of controlling consistofcontrolling gouta, farget/allocation/uses, price and distributoin (agent).

This research found, first controlling the amount by officral of industry and comerce felt less to fulfil it availability, even kind of premium and diesel fuel in SPBU. Second, toward the allocatoin because occured the hoarding/accumulation. Third, concerning to the price of BBM that there is distinguished of highest retail price in SPBU and retail trader, so that society feel worryng and burden with society's economic. Fourth, toward the distribution (agent) caused of the latest sending premium during thirty minutes from filling up refresment stand to SPBU in Pekanbaru.

There are some contrait of controlling which done by the city's government to ward distribution of BBM are human resource because accordy to the totality stree last and the quality or capability still low, tools or facility. Less operational transportatir and not obey the rules which was determined by government, finances resource/budget/less of operational. Cost that is cost of quota subsidized BBM, society decided policy of driving cash omect awarting. For poor society in Pekanbaru or all in indonesia and petroleum mafia.

Keywords: Monitoring, Government's rule towad the BBM distribution.

ABSTRAK

Studi ini ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru tahun 2011. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena luasnya, rentang/ruang/lingkungan/cakupannya. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjalan dengan baik sesuai dengan waktu dan jadwalnya ke SPBU Pekanbaru. Pelaksanaan pengawasan tersebut meliputi 4 hal yakni pengawasan terhadap jumlah/kouta, peruntukkannya/sasaran/penggunaanya, harga dan distribusi (agen). Penelitian ini menemukan *pertama* pengawasan terhadap jumlah oleh disperindag dirasakan kurang mencukupi ketersediaannya baik jenis premium dan solar di SPBU. *Kedua* terhadap peruntukkannya karena terjadinya penimbunan/penumpukan. *Ketiga*, terhadap harga BBM bahwa HET adanya perbedaan ditempat SPBU dan pedagang eceran kepada konsumen, sehingga masyarakat mengalami kekhawatiran dan terbebani dengan ekonomi masyarakatnya. *Keempat*, terhadap distribusi (agen) diakibatkan karena adanya keterlambatan pengiriman premium selama 30 menit dari depot pengisian ke SPBU di Pekanbaru.

Kata Kunci : *Pengawasan, Peran Pemerintah Terhadap Distribusi BBM*

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2012 pada ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan BBM adalah bensin premium atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu. Jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (*Koresene*), bensin (*gasoline*), dan minyak solar (*gas oil*) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. Terminal BBM/depot/penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT.Pertamina (persero) dan/atau badan usaha lainnya mendapat penugasan dan pendistribusian jenis BBM tertentu. Harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut: Minyak Tanah (Koresene) sebesar Rp.2.500/liter, Bensin (gasoline)/ premium sebesar Rp. 4.500/liter dan Minyak solar (Gas Oil) sebesar Rp. 4.500/liter.

BBM sudah menjadi keperluan vital bagi masyarakat, mulai dari rumah tangga, transportasi, industri (usaha mikro) dan pelayanan umum. Pergerakan BBM yang stabil akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Tetapi sebaliknya, ketidakstabilan distribusi BBM akan berdampak munculnya gejolak ditengah masyarakat. Begitu juga dengan Riau yang permintaan akan keperluan BBM meningkat tapi belum bisa terpenuhi, dikarena belum tepatnya metode pendistribusian BBM yang dilakukan. Banyak depot bayangan yang berjamuran. Untuk itu menjamin kelancaran penyaluran dipandang perlu untuk melakukan pembinaan, pengawasan penyaluran dan pengendalian yang didasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau No.12 Tahun 2002.

Dengan demikian, bidang pendistribusian dan penyaluran BBM merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Disperindag di Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2008. Disperindag Kota Pekanbaru merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan Keputusan Gubernur No. 17 Tahun 2003.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Riau dalam pasal 9 ayat 1 tentang pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

- a. Penyaluran/penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri.
- b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pertamina atau badan usaha lainnya dan pemda setempat.
- c. Realisasi harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Selanjutnya pada pasal 16 yang berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang kegiatan penyaluran BBM, adapun pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1. BU-PIUNU wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur dan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 3 bulan sewaktu-waktu diperlukan.
2. Laporan mengenai kegiatan penyaluran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: rekapitulasi volume pendistribusian perjenis BBM, sarana dan fasilitas penyaluran yang digunakan berikut kepemilikan dan kapasitasnya termasuk penambahan atau pengurangannya, kinerja penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran BBM.

Berdasarkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan yang ditemukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM jenis premium, solar dan pertamax yang terjadi kelangkaan di Kota Pekanbaru dan ratusan kendaraan hampir di seluruh SPBU antrean panjang dan diserbui pembeli dan susahny mendapatkan BBM bersubsidi jenis premium di SPBU dan terpaksa membeli dari pedagang ecerannya yang harganya mencapai Rp.8.000/liter. Adapun yang menjadi gejala-gejala penyebab kelangkaan BBM di kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Ketersediaan atau stoknya (over kouta) kurang karena terjadinya akibat keterlambatan pendistribusian pasokan BBM ke beberapa SPBU di Kota Pekanbaru dan antrian panjang bagi pemakai kendaraan daratan di setiap SPBU.
2. Pola distribusi yang berubah karena pola sistem distribusi BBM merasa kesulitan dan sistem teknologinya yang diperbaharui penyalurannya sulit sehingga terus terganggu bahkan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal.
3. Ada penimbunan atau penyalahgunaan peruntukkannya karena terjadinya penumpukan atau pengumpulan BBM di suatu tempat tertentu oleh spekulen atau oknum-oknum tertentu serta penyalahgunaan peruntukkannya terjai penyimpangan atau penyaluran BBM tidak tepat sasaran. Penyalahgunaan sasarannya terdiri dari dua konsumen, yaitu : konsumen masyarakat dan konsumen industri. Semuanya tindakan ini dengan maksud dan tujuan menaikkan harga BBM di pasaran.

B. Perumusan Masalah

Merupakan suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya fenomena mandiri maupun fenomena yang saling terkait diantara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat (**Irwandi Syofyan 2011:35**). Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dan geejala-gejala pokok yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari peneliti yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor kendala dalam pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk menambah referensi bagi mahasiswa terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan penelitian lainnya.
3. Penelitian ini juga digunakan sebagai wahana bagi penulis untuk mempraktikkan ilmu dan teori yang telah penulis pelajari selama di bangku perkuliahan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada semua pihak terkait dengan pengawasan terhadap distribusi BBM Kota Pekanbaru Tahun 2011.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah penelitian ini.
6. Sebagai bahan informasi yang memahami bagaimana pengawasan pemerintah terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru Tahun 2011.

D. Tinjauan Teoritis

a. Pengawasan

Lubis (2002:153) mengidentifikasikan pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan terdiri atas tindakan dan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* (Schermerhorn, 2002) Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1995).

b. Peran Pemerintah Terhadap Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Konsep distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat dan pengalihan hak milik.

Peran pemerintah dalam membidangi perekonomian nasional khususnya tentang minyak dan gas bumi. BBM adalah menyediakan dan mendistribusikan kouta BBM

bersubsidi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia baik se-kabupaten/kota/provinsi dan meningkatkannya pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maupun melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan pengertian terhadap faktor/variabel yang diperkirakan ada dalam objek penelitian, maka untuk memudahkan dan mengutamakan persepsi pengertian serta menjelaskan arah penelitian yang ada. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan uraian konsep teoritis, maka penulis merumuskan definisi konsep penelitian ini, yaitu:

1. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan secara rutin setiap tahun yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan yang dilakukan secara berjenjang dari sebulan hingga enam bulan sekali, tetapi khusus pengaduan akan cepat dilakukan tindak lanjutnya.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM kota Pekanbaru dengan apa yang ditetapkan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang berwenang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
4. Mobil plat merah di lingkungan pemerintah adalah mobil dinas milik pemerintah Kota Pekanbaru di larang menggunakan BBM bersubsidi jenis premium.
5. BBM adalah BBM bersubsidi yang memiliki jenis premium (bensin), minyak tanah (koresene), dan minyak solar (gas oil).
6. SPBU adalah tempat untuk menyalurkan BBM dari depot langsung kepada konsumen untuk kebutuhan pemakaian kendaraan bermotor di daratan.
7. Faktor kendala adalah segala sesuatu hal yang menghalangi oleh Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru.
8. Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap distribusi BBM adalah suatu kegiatan/proses penilaian yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan suatu kegiatan sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, yang meliputi bentuk-bentuk pengawasan, antara lain:
 - a. Pengawasan terhadap jumlah/kuantitas/kouta
 - b. Pengawasan terhadap peruntukkannya/sasaran/penggunaannya
 - c. Pengawasan harga
 - d. Pengawasan distribusi (agen)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, dimana metode kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas. Penggunaan metode kualitatif ini berupa studi kasus dengan analisis deskriptif. **Lexy J. Moleong**, mengemukakan metode kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (**Lexy J. Moleong, 2001**).

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di jalan teratai No. 83 Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena terjadinya kelangkaan BBM yang berakibat keterlambatan pendistribusian pasokan BBM ke beberapa SPBU oleh Pertamina Kota Pekanbaru serta panjang antrean kendaraan bermotor. Dalam upaya mendapatkan data dan informasi, maka penelitian ini juga melibatkan media (Riau Pos, Tribun, Haluan Riau dan media-media lainnya). Hal ini untuk mendapatkan data dan informasi tambahan bagi penulis.

2. Informan Penelitian

Informasi adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Dengan demikian, penulis mewawancarai beberapa informan penelitian yang dianggap mengetahui masalah, meliputi: Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, Kepala Seksi Usahan Perdagangan dan Metrologi, Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan, Pemilik SPBU, Manajer PT.Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru, dan Anggota DPRD Komisi Kota Pekanbaru. Berikut penjelasannya dalam bentuk tabel untuk diwawancarai kepada responden tersebut :

Tabel I.4

Jumlah Responden Yang Akan Di Wawancarai Sebagai Sumber Key Informan Penelitian

No	Responden	Jumlah
1	Kepala Bidang Perdagangan Kota Pekanbaru	1 orang
2	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Kota	1 orang

	Pekanbaru	
3	Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Kota Pekanbaru	1 orang
4	Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan Kota Pekanbaru	1 orang
5	Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Kota Pekanbaru	1 orang
6	Pemilik SPBU Kota Pekanbaru	1 orang
7	Manajer PT.Pertamina Region I BBM Ritel Pekanbaru	1 orang
8	Anggota DPRD Komisi Kota Pekanbaru	1 orang
	Jumlah	8 orang

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dari objek penelitian perorang, kelompok dan organisasi (Ruslan, 2004:29). Penulis memperoleh secara langsung dari responden berupa *Key Informan* dengan teknik wawancara dan menjadikan suatu objek penelitian ini terkait tentang pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor kendala yang dihadapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa: buku-buku hasil penelitian, media, website, dokumentasi resmi dari pemerintah, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (Interview) adalah percakapan antara dua pihak atau lebih dan berlangsung antara yang pewawancara dan diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara ini tujuannya untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara (interviewer) melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk di jawab oleh yang diwawancarai (interview) kepada responden (key informan) yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini di lakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan

hipotesa kerja yang digunakan (Moleong, 2005:103). Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data secara deksriptif kualitatif. Data kualitatif lebih berwujud kata-kata atau pembahasan daripada deretan angka. Dengan data kualitatif ini dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, disajikan dalam bentuk tabel-tabel ataupun gambar dan uraian serta kemudian memperoleh penjelasan yang berdasarkan data hasil penelitian.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Distribusi Bahan Bakar minyak di Kota Pekanbaru Tahun 2011

Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berjalan dengan baik sesuai dengan waktu dan jadwalnya ke SPBU Pekanbaru, sebatas dengan tenaga, dana dan sarana yang ada. Pengawasan yang dilakukannya memang belum optimal karena luasnya, rentang atau ruang atau lingkungannya atau cakupannya. Pelaksanaan pengawasan tersebut meliputi empat hal yakni berupa pengawasan terhadap jumlah atau kuantitas atau kuota, pengawasan terhadap peruntukannya atau sasaran atau penggunaannya, pengawasan harga dan pengawasan distribusi (agen). Adapun empat hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

A. Pengawasan Terhadap Jumlah/Kuantitas/Kuota

Dalam suatu pengawasan terhadap jumlah atau kuantitas atau kuota bahwa jumlah alokasi kuota bahan bakar minyak *Public Service Obligasi* (PSO) atau subsidi di provinsi Riau mengalami penurunan yang cukup besar. Dibandingkan tahun 2011 lalu, penurunan terjadi lebih dari 144.000 KL dibandingkan dengan kouta sebelumnya. Hasil koordinasi bersama dengan 16 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pertamina dan Hiswana Migas, dapat diketahui untuk jenis BBM premium, alokasi kuotanya tahun 2011 mencapai 744. 304 KL dan tahun 2012 alokasi kuotanya hanya 673.437 KL. Selanjutnya solar, alokasi kuota 2011 lalu sebesar 674.838 KL dan 2012 alokasi kuota 668.628 KL atau selisih 6.210 KL.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa alokasi kuota BBM dirasakan kurang mencukupi ketersediannya baik jenis premium maupun solar di SPBU Kota Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan pabrik baik konsumen masyarakat maupun konsumen industri. Oleh karena itu perlu ditambah alokasi kuota BBM dan secukupnya tersedia di SPBU dan tepat waktu agar tidak terjadinya keterlambatan lagi, sehingga warga tidak perlu khawatir atau merasa rugi. Pasokan yang disediakan sesuai kebutuhan banyaknya jenis kendaraan menggunakan premium sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

B. Pengawasan Terhadap Peruntukannya/Sasaran/Penggunaannya

Dalam suatu pengawasan terhadap peruntukannya atau sasaran atau penggunaannya adalah yang terdiri sasarannya untuk kebutuhan BBM yaitu konsumen masyarakat ataupun

konsumen industri. Kebijakan pemerintah pusat telah melakukan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Kondisi ini membuat Pertamina telah meminta kepada pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bekerjasama dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi tersebut. Pengawasan terhadap sarannya ada dua yakni, golongan menengah ke bawah maupun golongan menengah ke atas. Untuk golongan menengah ke atas tidak memakai BBM bersubsidi, tetapi memakai BBM non-subsidi (Pertama-X). Untuk golongan menengah ke bawah memakai BBM subsidi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mengenai peruntukkannya pihak distributor (Pertamina) untuk lebih meningkatkan pengawasannya dalam masalah distribusi BBM dan digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan tepat sasaran. Distribusi, transportasi harus diawasi hingga SPBU dan pengecer. Berharap jangan ada pihak yang mencoba untuk mengambil kesempatan dengan menimbun BBM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus dapat mengawasi dan mengendalikan dengan baik.

C. Pengawasan Terhadap Harga BBM Di SPBU

Dalam suatu pengawasan terhadap harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah kota yakni Disperindag Kota Pekanbaru yaitu harga BBM tidak mengalami masalah, harga eceran atau HET BBM jenis premium dan solar sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp.4.500/liter dan tidak ada harga eceran lainnya sehingga tidak merugikan konsumen publik. Akan tetapi, kondisi kota Pekanbaru semakin parah karena adanya pengurangan pendistribusian akibat over kuota pemakaian BBM subsidi pada tahun ini, dan telatnya kedatangan kapal tanker penyuplai premium. Sehingga membuat pemilik kendaraan terpaksa memilih untuk membeli dipedagang eceran dengan harga lebih mahal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa harga jual eceran jenis eceran BBM adanya perbedaan di tempat SPBU dan pedagang eceran kepada konsumen, sehingga membuat masyarakat mengalami kekhawatiran dan terbebani dengan ekonomi masyarakatnya. Harga BBM tidak seragam dengan ketentuan Pemerintah Pusat.

D. Pengawasan Terhadap Distribusi (Agen)

Pelaksanaan suatu pengawasan untuk distribusi (agen) di Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak Pertamina Kota Pekanbaru ke SPBU di akibatkan karena adanya keterlambatan pengiriman premium selama 30 menit dari depot pengisian ke SPBU di Pekanbaru. Keterlambatan pengiriman ini telah berakibat ketersediaan stok BBM di SPBU habis dan terjadi kepanikan warga Pekanbaru. Antisipasi ketahanan stok BBM di Riau oleh Pertamina ada 3 depot, yakni depot Siak, depot Dumai dan depot Tembilahan. Untuk depot Siak yang melayani kebutuhan BBM Kota Pekanbaru dan 8 kabupaten lainnya di Riau rata-rata kini memiliki ketahanan stok untuk 5 ½ hari. Pertamina sebagai distributor penyalur BBM melakukan antisipasi dan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan BBM. Pemerintah Kota mengharapkan agar pihak Pertamina secepatnya meningkatkan pendistribusian BBM dan stok harus ditambah untuk semua SPBU, agar masyarakat tidak merasa khawatir akan kelangkaan dan mengantri lama untuk mendapatkan BBM.

2. Faktor-faktor Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Distribusi BBM Di Kota Pekanbaru

Pada bagian ini penulis akan menguraikan faktor-faktor kendala dalam melakukan pengawasan pemerintah Kota terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil temuan dan wawancara penulis dengan informan penelitian. Adapun faktor-faktor itu antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM, Disperindag Kota Pekanbaru harus memiliki sumber daya yang kompeten dalam melakukan pengawasan. Tetapi dalam kenyataannya Disperindag Kota Pekanbaru kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM). Beberapa faktor sumber daya manusia (SDM) dimiliki oleh pemerintah kota, sebagai berikut:

- a. Segi jumlahnya masih kurang.
- b. Segi kualitasnya atau kemampuannya masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota yakni Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap alat-alat meteran BBM atau mesin pompa berjalan dengan baik, cuma pengelola SPBU pekanbaru tidak serius menjalankan tugas bahkan tidak rutin setiap harinya dan mengecek literan atau ukurannya yang sudah dimasukkan kedalam mesin pompa.

2. Peralatan/Fasilitas (sarana dan prasarana)

Dalam suatu pengawasan juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai penunjang agar dalam suatu kegiatan dapat berjalan secara optimal. Sarana dan fasilitas adalah sarana *dan/atau* fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan penyaluran BBM.

Adapun sarana dan prasarana yang menjadi faktor kendala dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM adalah kurangnya kendaraan operasional dan tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah kepada kendaraan operasional pemerintah di lingkungan Kota Pekanbaru.

3. Sumber Daya Keuangan (Anggaran)

Faktor keuangan dalam melakukan pengawasan berperan sangat penting dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan adalah biaya operasional di suatu lingkungan dengan melakukan terhadap distribusi BBM di setiap SPBU. Pada pengawasan terhadap distribusi BBM untuk masing-masing kota/kabupaten/provinsi khususnya di Riau diperlukan anggaran, yaitu biaya kouta BBM bersubsidi tahun 2011.

4. Sosialisasi Ekonomi Masyarakat

Masyarakat miskin (rumah tangga) adalah kelompok yang paling merasakan beban berat akibat kenaikan harga BBM. Meningkatnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam kondisi yang miskin dan menjerat. Kerentanan terhadap gejolak ekonomi dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di Indonesia dan semakin berlarut-larut dengan adanya kenaikan harga BBM. Pemberian BLT Plus bukan merupakan satu-satunya jenis bantuan yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian rumah tangga miskin dan masyarakat Indonesia secara umum. Bantuan ini merupakan bantuan "antara" yang bertujuan untuk menjadi pertolongan pertama bagi kondisi perekonomian rumah tangga yang terpuruk akibat kenaikan harga hampir semua jenis kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala-kendala sosialisasi ekonomi masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin karena tidak mampu untuk membeli BBM dalam menjelang kenaikan harga BBM, maka itu pemerintah kembali menetapkan kebijakan pemberian BLT Plus untuk masyarakat Pekanbaru maupun di seluruh Indonesia.

5. Mafia Perminyakan

Kendala-kendala mafia perminyakan melakukan tindakan yang tidak baik seperti melakukan kecurangan dan melanggar hukum dari pemerintah. Maka itu kondisi ini harus dihentikan dan sebaiknya bagi pelaku diberikan sanksi tegas. Termasuk oknum aparat penegakan hukum yang mencoba melindungi kegiatan ilegal ini. Jangan sampai ada lagi mafia "kencing minyak" yang menjalankan aksinya begitu mudah. Jika masih ada, maka tidak menutup kemungkinan hal ini akan memicu anarkisme rakyat yang jelas-jelas menentang kenaikan harga BBM.

Seharusnya kendala-kendala tersebut haruslah dapat diatasi agar pelaksanaan pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi BBM kepada konsumen publik Kota Pekanbaru bisa terlaksana dengan baik karena pemerintah itu fungsinya untuk mengabdikan dan mensejahterakan negara dan masyarakatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal, hal ini berakibat karena masih kurangnya ketersediaannya atau stok BBM untuk konsumen publik, kurang tepatnya sasaran atau penggunaannya dan pola sistem distribusinya berubah sehingga perjalannya merasa kesulitan dan terganggu serta terlambatnya penyaluran BBM ke SPBU oleh pihak Pertamina.
2. Salah satu tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kendala pengawasan pemerintah kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru terhadap distribusi BBM. Adapun faktor kendala yang ada dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu faktor penyebab sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Yang menjadi kendala utama dalam pengawasan terhadap distribusi BBM ini adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) melalui segi jumlahnya dan kualitasnya lemah, kurangnya sumber peralatan (sarana dan prasarana) melalui kendaraan operasional, kurangnya sumber keuangan.
3. Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kota terhadap distribusi BBM menyatakan bahwa pelaksanaannya tidak ada masalah dan berjalan dengan baik sesuai dengan waktu dan jadwalnya secara rutin dan tera ulang terhadap SPBU Pekanbaru sebatas dengan tenaga, dana dan sarana yang ada. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memang belum optimal meliputi ketersediaannya, harga peruntukannya atau sasarannya dan sistem distribusinya terus berubah.

B. Saran

Dari hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru, maka penulis menyarankan dari kesimpulan diatas sebagai berikut :

1. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi penyajian, penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi selanjutnya.
2. Di harapkan pihak Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan pengawasan dan tegas terhadap distribusi BBM di setiap SPBU kota Pekanbaru secara rutin mulai dari sebulan hingga enam bulan sekali. Tetapi khusus pengaduan akan cepat dilakukan tindak lanjutnya dan harga BBM harus seragam dengan ketentuan pemerintah pusat.

3. Di harapkan agar pihak Pertamina secepatnya menyelesaikan masalah kelangkaan BBM jenis premium, solar yang terjadi hampir diseluruh SPBU, agar tidak ada kekhawatiran bila antrian panjang kendaraan bermotor di setiap SPBU dan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat serta ketersediaan atau stoknya (over kuota) harus terjamin untuk memenuhi kebutuhan publik dengan harga sesuai ketentuan pemerintah pusat. Pihak Pertamina dapat mengawasi SPBU untuk tidak menjual BBM kepedagang eceran, agar tidak terjadi kenaikan harga.
4. Di harapkan agar pihak pertama segera mencari solusi kelangkaan BBM dan sistem penyaluran lebih optimal. Pertamina di imbau meningkatkan dan memperlancar proses distribusi.
5. Di harapkan agar semua pengelola SPBU diwilayah kota Pekanbaru kedepannya untuk melakukan tera ulang atau mengecek mesin pengisiannya atau alat-alat meteran sesuai dengan ukurannya secara rutin setiap tahun sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.
6. Di harapkan agar pihak masyarakat Kota Pekanbaru turut bekerjasama atau ikut serta membantu dengan cara melakukan melaporkan SPBU jika ada melakukan kecurangan kepada pemerintah dan Pertamina. Masyarakat juga agar tetap tenang dan tidak khawatir terjadinya kelangkaan BBM ini dan masyarakat agar segera melaporkan jika ada kejanggalan dalam distribusi BBM, tidak hanya pemerintah, polisi atau Pertamina, masyarakat juga berhak mengawasi distribusi BBM. Laporkan segera segala kejanggalan dalam distribusi BBM, baik di SPBU maupun pedagang lainnya kepada pihak berwajib.
7. Di harapkan Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru kedepan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak Pertamina, pemilik SPBU dan pengelola SPBU dan pengelola SPBU agar usaha ini lebih berkembang dan lebih layak digunakan oleh konsumen publik.
8. Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hendaknya memperhatikan segala kendala-kendala yang ada selama melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Feliatra, dkk. 2011. Metodologi Penelitian” *Persiapan Bagi Peneliti Pemula*”.
Pekanbaru: Faperika Press UR
- Gunawan, Benny. 200. Dasar-dasar Manajemen (Edisi Kedua). Jakarta : Penerbit
Pustaka Binaan
- Handoko, Hani T. 2002. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Edisi
Revisi). Yogyakarta: BPFE
- Irwandy, Syofyan. 2011. Metodologi Penelitian “ *Persiapan Bagi Peneliti
Pemula*”. Pekanbaru : Faperika UR
- Lubis Ibrahim. 2002. Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen.
Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Katili, Laura R. 2002. Pengendalian dan Pengawasan Dalam Manajemen Suatu
Pengantar. Jakarta : Penerbit Ghalian Indonesia
- Manullang M. 2002. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia
- Nawami, hadari. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang
Kompetitif. Yogyakarta : BPEE UGM
- Sarwoto, 2001. Dasar-dasar Organisasi Manajemen (Cetakan Kedelapan). Jakarta:
Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Penerbit
Bumi Aksara
- Situmorang, Viktor S dan Jusuf Juhir. 2002. Aspek Hukum Pengawasan Atasan
Langsung. Jakarta : Rhineka Cipta
- Udaya, Judus dan A.M kadarman S.J. 2004. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama
- Sandiago, Uno. 2007. Kebijakan BBM Industri Sebabkan Ketidakpastian Tempo Interaktif

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden No.15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
Pengguna jenis BBM tertentu

Peraturan Pemerintah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyaluran BBM

Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan
Disperindag Kota Pekanbaru

Keputusan Gubernur No. 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembina
dan Pengawasan Penyaluran BBM

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Hulu Migas Dikelola Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 16
Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM

SK Ka.BPH Migas No. 116/07/Ka.BPH/2012 Tentang Penetapan Alokasi Kouta
BBM PSO Untuk Wilayah Provinsi Riau Tahun 2012

Surat Keputusan Gubernur Riau No. 500/ADM-EK/06.07 Yang Ditujukan
Kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM Perihal Permintaan
Penambahan Alokasi Kouta BBM Tahun 2012

Surat Keputusan Fuel Retail Marketing Region I Sales Area Manager Retail Riau
No. 29/F31240/2011-S3

Keputusan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP No. 05/SE/2012 Tentang
Penghematan Energi Nasional dan Menjaga Kouta BBM Bersubsidi Tahun 2012.

